

Analysis of Migration Phenomenon and Urban Bias in Indonesia

Ana Susiati

Universitas Jember

Corresponding Author: Ana Susiati anasusiati.fkip@unej.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Phenomenon,
Migration, Urban Bias

Received : 3 November

Revised : 23 November

Accepted: 24 December

©2022 Susiati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The situation in urban areas that is experiencing the phenomenon of uncontrolled urbanization will result in many new problems such as increased deviance due to poverty, massive unemployment, an increase in slum areas, and so on. From this, urbanization can be seen as an indicator in determining the level of urban development both in the economic and social context. That way, it is possible to better see the form or understanding of urbanization and its impact on life in the city. Qualitative literature review is used by researchers as a type of research in this study. The data used is secondary data obtained indirectly from certain parties and media, meaning that there are certain parties who become intermediaries where they are the ones who obtained and recorded the data beforehand. Developmental life and developmental backwardness are “a series which are interrelated and cannot be separated from one another. Underdevelopment in rural areas arises because there is no balanced development carried out in urban areas. Distributed contributors to the failure of development in rural areas are the wrong views of influential actors in making views on rural conditions, both the physical and social conditions of the people. Urban bias is a concept that still influences development goals in rural areas and is considered relevant

Analisis Fenomena Migrasi dan Urban Bias di Indonesia

Ana Susiati

Universitas Jember

Corresponding Author: Ana Susiati anasusiati.fkip@unej.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Fenomena, Migrasi, Urban Bias

Received : 3 November

Revised : 23 November

Accepted: 24 December

©2022 Susiati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Keadaan di wilayah perkotaan yang mengalami adanya fenomena urbanisasi yang tidak terkontrol, akan mengakibatkan banyaknya masalah baru seperti meningkatnya penyimpangan tindakan karena kemiskinan, pengangguran besar-besaran, peningkatan kawasan kumuh, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu indikator dalam menentukan tingkat perkembangan kota baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, dimungkinkan untuk lebih melihat bentuk atau pemahaman urbanisasi dan dampaknya terhadap kehidupan di kota. Kualitatif dengan kajian pustaka digunakan peneliti sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak dan media-media tertentu, artinya adanya pihak tertentu yang menjadi perantara yang dimana mereka sebagai yang memperoleh dan mencatat data-data tersebut sebelumnya. Kehidupan pembangunan dan keterbelakangan pandangan adalah "satu rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterbelakangan di wilayah pedesaan muncul karena tidak terdapat keseimbangan pembangunan yang dilakukan di wilayah perkotaan. Penyumbang tersebar dalam kegagalan pembangunan di wilayah pedesaan adalah kesalahan pandang aktor-aktor berpengaruh dalam membuat pandangan terhadap kondisi pedesaan baik fisik maupun kondisi sosial masyarakatnya". Urban bias menjadi sebuah konsep yang sampai sekarang masih berpengaruh pada tujuan pembangunan di daerah pedesaan dan dianggap masih relevan.

PENDAHULUAN

Migrasi merupakan salah satu fenomena penduduk yang dipelajari dalam studi Ilmu Geografi. "Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut". Apabila penduduk yang meninggalkan suatu daerah jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduknya yang masuk, maka migrasi bisa mengurangi jumlah penduduk di daerah tersebut.

Pratiwi (2007) mendefinisikan migrasi sebagai "perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik sifatnya permanen (bertempat tinggal di tempat yang baru paling sedikit 340 hari) atau semi permanen (hanya tinggal selama 15 hari dihitung dari awal kepindahannya ke tempat tersebut), yang melewati batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara atau daerah atau juga melampaui batas politis atau batas negara". Lee (Chotib, 2012) mengartikan migrasi sebagai "perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen, tanpa memperlakukan dekat jauhnya perpindahan, mudah atau sulit, terpaksa atau sukarela, maupun dalam negeri atau luar negeri".

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi migrasi, bergantung pada perbedaan nilai antara satu wilayah dengan wilayah lain, individu yang bermigrasi, wilayah yang menjadi tujuan migrasi, dan sifat dari wilayah asal migrasi. Seseorang yang bermigrasi pastinya merasa bahwa daerah aslinya kurang menarik dibandingkan dengan daerah tujuannya. Maryani (2002) mengatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi seseorang untuk bermigrasi antara lain:

- 1) Sosial budaya, adanya perasaan jenuh pada terbatasnya fasilitas sosial budaya misalnya hiburan, kesehatan, atau pendidikan dan jenuh pada ikatan budaya dan adat setempat.
- 2) Keamanan, misalnya minimnya ketenangan hidup dan situasi keamanan yang rawan
- 3) Fisik, terdapat banyak hambatan secara fisik misalnya SDA yang terbatas, kurang subur nya lahan, tidak menguntungkan nya topografi, tata air, dan kondisi cuaca
- 4) Demografi, misalnya banyaknya beban tanggungan, tingginya angkatan kerja, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi
- 5) Ekonomi, contohnya kemiskinan, keterbatasan modal, keterbatasan lapangan pekerjaan selain pertanian, pendapatan dan upah yang rendah, dan pemilikan lahan yang rendah.

Bisa dikatakan bahwa faktor umum pendorong adanya migrasi adalah faktor ekonomi dan non ekonomi. Terdapat beberapa teori yang menyebutkan bahwa "faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya migrasi, seseorang cenderung melakukan migrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonominya".

Tidak meratanya pembangunan antar daerah baik dari sarana maupun infrastruktur menyebabkan munculnya motif migrasi tersebut. Pedesaan menjadi lebih tertinggal karena hanya wilayah perkotaan saja yang difokuskan

dalam pembangunan sehingga muncul istilah yang disebut “urban bias” yang menggambarkan pembangunan yang lebih memprioritaskan wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Peningkatan di sektor pembangunan wilayah perkotaan banyak mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga wilayah perkotaan menjadi pilihan yang menggiurkan kepada masyarakat di pedesaan untuk datang mencari pekerjaan dan tempat menetap, inilah yang sering disebut dengan urbanisasi. Akan tetapi, proses urbanisasi sendiri dapat memicu adanya masalah apabila terjadi dengan tidak terkontrol. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat terkonsentrasi. Akan semakin parah apabila tidak dilakukan dengan kecepatan yang sepadan dengan pertumbuhan industrialisasi, masalah ini pada akhirnya akan mengarah pada urbanisasi yang berlebihan.

Terjadi peningkatan tren peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota jika dilihat dari segi kependudukan dan demografi. Tahun 2014 Bappenas menyebutkan bahwa dibandingkan di pedesaan, jumlah penduduk lebih banyak di wilayah perkotaan. “Meningkatnya urbanisasi membuat kemiskinan terkonsentrasi di kota, akan tetapi hal ini terjadi karena adanya pandangan masyarakat desa bahwa kota mewakili harapan mereka dan salah satu upaya mengubah stratifikasi sosial agar lepas dari belenggu dan rantai kemiskinan”.

Sementara itu terjadi penghambatan pengelolaan SDA di wilayah pedesaan karena banyaknya penduduk yang berpindah ke kota. Terjadi banyak dampak turunan akibat berkurangnya penduduk desa dan bertambahnya penduduk di kota misalnya keseimbangan kota yang menjadi pusat pertumbuhan beserta daya dukungnya menjadi hilang.

Keadaan di wilayah perkotaan yang mengalami adanya fenomena urbanisasi yang tidak terkontrol, akan mengakibatkan permasalahan baru misalnya peningkatan penyimpangan tindakan karena pengangguran yang tinggi, kemiskinan, peningkatan kawasan kumuh, dan lain lain. Dari hal tersebut, urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu indikator dalam menentukan tingkat perkembangan kota baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, dimungkinkan untuk lebih melihat bentuk atau pemahaman urbanisasi dan dampaknya terhadap kehidupan di kota.

Dengan dengan berjalannya waktu yang begitu tinggi mobilitas penduduknya, keadaan ini akan menimbulkan degradasi kota sehingga dibutuhkan sebuah usaha untuk mempertahankan wilayah pedesaan. “Tantangan-tantangan tersebut mengarah kepada pembangunan yang seyogyanya memperhatikan kewilayahan karena selama ini pembangunan yang urban bias membawa dampak buruk yaitu ketimpangan rural urban linkage yang ditunjukkan oleh fenomena back wash effect”. Berdasarkan penjelasan dasar diatas, peneliti mempertimbangkan berbagai fenomena dan peristiwa terkait migrasi dan urban bias yang terjadi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Migrasi

Sebuah pergerakan pelintasan batas wilayah asal ke wilayah yang ingin dituju oleh seorang atau beberapa orang penduduk dengan tujuan untuk menetap disebut migrasi (Mantra, 2012). Sementara itu pergerakan penduduk dari daerah asal ke daerah lainnya tanpa adanya keinginan menetap disebut migrasi non permanen. Steele (Mantra, 2012) mengatakan bahwa "bila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku migrasi non-permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama".

Migrasi dalam perspektif sosiologi dibagi kedalam 2 bentuk jika dilihat dari sifatnya, yakni:

1. Migrasi horisontal, yakni perpindahan penduduk secara geografis, spasial, dan teritorial
2. Migrasi vertikal yakni berubahnya status sosial melalui kedudukan generasi sebelumnya misalnya kedudukan orang tuanya.

Untuk dimensi daerah secara garis besarnya dibedakan perpindahan antar negara yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang disebut migrasi internasional dan perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara misalnya antar propinsi, kota atau kesatuan administratif lainnya yang dikenal dengan migrasi intern. Perpindahan yang dilakukan masih dalam satu wilayah yang sama walaupun berbeda kota atau alamat, misalnya masih di provinsi yang sama disebut sebagai perpindahan lokal. Secara lebih luas, migrasi didefinisikan sebagai "tempat tinggal migrasi penduduk secara geografis yang meliputi semua gerakan (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu pula".

Terdapat beberapa bentuk migrasi, antara lain:

1. Non Recurrent Movement atau perpindahan tempat tinggal tanpa ada niatan kembali ke daerah semula karena benar-benar ingin menetap
2. Perpindahan tempat tinggal secara tidak sementara bagi para pekerja musiman
3. Recurrent Movement atau perpindahan tempat tinggal secara rutin bagi orang-orang yang pulang dan berangkat dari tempatnya bekerja.

Stres dan kebutuhan menjadi faktor utama mengapa seseorang bermigrasi (Mantra, 2008). "Setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis, sSemakin besar kebutuhan tidak dapat terpenuhi, semakin besar stres yang dialami". Seseorang yang sudah sangat stres akan memilih tempat tinggal baru yang dinilainya lebih berfaedah dan dapat memenuhi kebutuhan diri dibandingkan tempat lamanya. Teori yang dikembangkan tersebut kemudian disebut sebagai "model stress-treshold atau place-utility".

Alasan seseorang memutuskan untuk bermigrasi dijelaskan oleh beberapa teori, salah satunya teori stress dan kebutuhan (Mantra, 2008) Setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, antara lain kebutuhan psikologi, politik, sosial, dan ekonomi. Seseorang akan mengalami stres jika tidak terpenuhi kebutuhannya. Tingkat pemenuhan kebutuhan berbanding terbalik dengan stres yang seseorang alami.

Seseorang masih bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kebutuhan sehari-hari serta tetap bisa bertahan di daerah asalnya apabila stres yang dialaminya masih bisa ditoleransi. Sebaliknya, orang-orang akan mulai memikirkan untuk bermigrasi atau berpindah ketika stres yang mereka alami sudah sangat tinggi dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya di tempat asal. Mantra (2008) mengatakan bahwa "hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan perpindahan atau mobilisasi dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah (place utility) lebih rendah ke daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi dimana kebutuhannya dapat terpenuhi".

Pengertian Urbanisasi

Soetomo (2009) mengatakan bahwa berpindahnya seorang atau sekelompok penduduk dari desa menuju ke kota pada suatu pulau yang sama disebut urbanisasi. Urbanisasi juga didefinisikan sebagai sebuah proses pembentukan kehidupan kota yang berbanding terbalik dengan kehidupan di desa dalam bidang mentalitas, sosial, maupun ekonominya (Sugiyono dalam Soetomo, 2009).

Urbanisasi disorong oleh beberapa faktor, yakni:

- a. Ketidakcocokan dengan pola hidup di pedesaan
- b. Merasa lebih terpendang jika memiliki pekerjaan di perkotaan
- c. Prasarana dan sarana yang terbatas
- d. Upah tenaga kerja yang rendah
- e. Lahan pertanian yang semakin sempit
- f. Kesempatan dan peluang kerja yang tidak beragam terutama selain sektor pertanian.

Faktor penariknya :

- a. Lebih bervariasinya peluang kerja dan kesempatan berusaha.
- b. Upah tenaga kerja di kota relative lebih besar
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana social yang kompleks.

Keban dalam Abbas (2002) berpendapat bahwa urbanisasi jangan hanya dalam konteks demografi saja karena urbanisasi mengandung pengertian yang multidimensional. Triatno Yudo Harjoko (2010) memberikan urbanisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Secara spasial, hal ini dikatakan sebagai suatu proses diferensiasi dan spesialisasi pemanfaatan ruang dimana lokasi tertentu menerima bagian pemukiman dan fasilitas yang tidak proporsional.

Pengertian lain dari urbanisasi, dikemukakan oleh Dr. PJM Nas (2010), pengertian pertama diutarakan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah

pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan masyarakatnya. Lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Pengertian kedua dari urbanisasi adalah, bahwa urbanisasi menyangkut adanya gejala perluasan pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial dan psikologi.

Dari beberapa pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek-aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya.

Makna Urban Bias

Golongan yang menimbulkan urban bias adalah kaum cendekiawan, birokrat dan orang asing, serta para wartawan. Banyak terdapat prasangka yang merintang hubungan dengan kemiskinan desa pada umumnya, dan dengan kemelaratan pada khususnya. Hal tersebut berlaku bukan hanya di kalangan pembangunan desa, tetapi juga di kalangan para peneliti dan petugas lapangan yang hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Enam prasangka yang menyebabkan kemiskinan di desa lepas dari pengamatan yaitu prasangka keruangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, prasangka diplomatis dan prasangka profesional (Chambers, 1988).

Pengetahuan tentang kondisi daerah pedesaan diperoleh secara singkat dan tidak mendalam oleh para pelaku 'urban bias' yang menimbulkan penilaian yang tidak nyata pada daerah pedesaan. Lipton (1991) menyatakan bahwa penilaian yang bias pada wilayah pedesaan dikarenakan ketidaktepatan penilaian dari wilayah pedesaan. Hal tersebut terjadi karena empat alasan yaitu, para penelaah tidak dapat menarik garis lurus antara pembagian wilayah pedesaan yang dekat dengan kota, pinggiran, taman dan pabrik desa. Ketidaktepatan dalam menentukan keberadaan sumberdaya yang dimiliki wilayah pedesaan yang sebenarnya ada dan bermanfaat atau yang tidak ada dan tidak bermanfaat. Penentuan wilayah pedesaan yang benar-benar mengalami kemiskinan dan yang sejahtera, dan kesalahan pengalokasian wilayah yang digunakan untuk pertanian, perindustrian pangan, investasi dan wilayah penduduk.

Halfacree (1993: 32), menyebutkan bahwa "wilayah pedesaan merupakan wilayah yang dapat dijelaskan berdasarkan tempat dan gambaran sosialnya, berdasarkan lokasinya, wilayah pedesaan merupakan wilayah yang secara spesifik memiliki karakteristik tertentu dalam segi fisik dan sosial dalam wilayah tersebut". Wilayah pedesaan pada umumnya dapat dianalisis pada beberapa hal; topografi, komposisi sosial dari manusia yang hidup dan atau pekerjaan, bentuk aktivitas, hubungan antara alam dengan manusia dan hubungan dengan wilayah yang lain dalam suatu lokasi. Jelas berdasarkan teori tentang wilayah pedesaan yang disampaikan oleh Halfacree (1993) bahwa "wilayah pedesaan berarti bahwa lokasi yang memiliki topografi beragam baik datar hingga bergelombang merupakan wilayah pedesaan sehingga sangat mempengaruhi persebaran sarana dan prasarana di dalam wilayah tersebut kaitannya dengan

wilayah-wilayah yang dijadikan sasaran kunjungan untuk kegiatan pembangunan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Fenomena Migrasi dan Urbanisasi yang Terjadi di Indonesia

Berbagai kebijakan yang bersifat gegabah di era orde baru di Indonesia mulai memunculkan masalah-masalah urbanisasi dan migrasi. Kebijakan pertama adalah menjadikan kota sebagai pusat ekonomi di tahun 1967-1980 atau disebut kebijakan ekonomi makro. Kebijakan kedua terjadi pada sektor pabrik berupa penggabungan kebijakan investasi asing dengan substitusi impor yang menyebabkan Jakarta sebagai pusat polarisasi pembangunan. Kebijakan ketiga terjadi pada dasawarsa awal tahun 1980 an berupa penyebaran proses mekanisasi pertanian dengan sangat cepat dan menimbulkan engganannya para sarjana dan kaum muda kembali ke daerah asal untuk bertani.

Arus urbanisasi yang tidak terkendali ini dianggap merusak strategi rencana pembangunan kota dan menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan pengendalian pemerintah kota. “Beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat pada masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan”. Dampak negatif lainnya yang muncul adalah terjadinya “over urbanisasi” yaitu dimana jumlah penduduk kota yang besar tidak mampu menampung lagi arus urbanisasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi di perkotaan.

Persoalan-persoalan urbanisasi telah menjadi perhatian yang cukup besar, beberapa pemikiran yang membahas dampak urbanisasi dari sudut pandangan ekonomi yaitu Evers dalam Abbas (2002) berpendapat bahwa “tingkat urbanisasi yang terlalu rendah dan mengabaikan kebutuhan kota dapat memperlambat kemajuan ekonomi”. Sedangkan menurut Keban, “proses urbanisasi yang tidak terkendali dan adanya hirarki kota akan menimbulkan berbagai akibat negatif yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya”.

Fenomena Migrasi dan Urbanisasi di Indonesia

Prasangka musim di wilayah perkotaan di Indonesia tidak bisa dihindarkan karena negara ini menjadi salah satu negara tropis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, tahun 2017 terdapat beberapa wilayah Indonesia yang tergolong miskin, yakni Deiyai, Intan Jaya, Membramo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, Paniani, Jayawijaya, Pegunungan Arfak, Tambrau, Sorong, Bintuni, Teluk Wondama, Maluku Barat Daya, Sumba, Lomnok Utara, Kepulauan Meranti, dan wilayah Nias Utara.

Menurut BPS, wilayah yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai pendapatan yang paling rendah dibandingkan wilayah lainnya sehingga dikatakan sebagai wilayah yang terbelakang. Mayoritas wilayah yang disebutkan ini letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan. Contohnya Sumba dan Papua yang sangat rendah aksesibilitas yang menyebabkan jarangya penelitian atau kunjungan ke wilayah-wilayah tersebut.

Akibatnya adalah ketidakmerataan pembangunan yang menghasilkan keterbelakangan seperti yang terjadi di wilayah-wilayah termiskin tersebut

sehingga hal ini perlu penanganan yang lebih lanjut untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

Pedesaan tidak hanya lekat dengan pengaruh-pengaruh buruk yang terdapat di dalamnya, namun wilayah pedesaan memiliki pula potensi yang dapat digunakan dan dikembangkan dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan dengan wilayah perkotaan yang dapat mendorong semakin tingginya keterbelakangan lingkungan pedesaan. Stanef (2012: 50) menjelaskan “wilayah pedesaan harus dinyatakan dalam pembedaan yang jelas tentang keadaan alam dan topografi, budaya dan kondisi penduduk yang mempengaruhi keadaan sosial dan ekonominya terutama dalam rangka upaya pembangunan, perlu adanya analisis potensi-potensi yang nyata di wilayah pedesaan supaya dapat menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak benar di wilayah pedesaan”.

Laju pertumbuhan proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pembangunan perkotaan, seperti pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Kita ketahui peningkatan jumlah penduduk di daerah pedesaan akan berkorelasi positif.

Dengan meningkatnya arus urbanisasi jika pola pembangunan masih bias ke arah kota (urban bias). Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi.

Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan.

Terdapat 3 alasan mengapa penduduk desa berkeinginan untuk melakukan migrasi ke kota, yakni “Pertama, sejak krisis melanda negeri ini semakin hari kesempatan kerja di daerah pedesaan semakin langka, sementara usaha yang sebelumnya ditekuni (pengrajin, pedagang dan lain sebagainya) mengalami kebangkrutan akibat krisis; Kedua adanya selisih upah yang cukup mencolok antara desa dan kota, hal tersebut salahsatunya tercermin pada perbedaan upah minimum regional antara daerah pinggiran dengan dan daerah pusat kegiatan ekonomi; Ketiga, di luar faktor ekonomi alasan yang cukup dominan mendorong penduduk desa untuk mengadu nasib di kota adalah karena masalah keluarga ataua sesuatu hal yang sifatnya personal”. Sebagian besar penduduk miskin di pedesaan, selain menawarkan kesempatan kerja yang lebih terbuka, kota juga dinilai memiliki “daya tarik” tertentu. Disisi lain, banyak studi yang membuktikan bahwasanya kehadiran kaum migran di daerah perkotaan sebenarnya merupakan salah satu respon dari adanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan semakin kronisnya masalah kemiskinan di daerah pedesaan.

Terjadinya migrasi di perkotaan atau (urbanisasi) tidak akan menjadi masalah jika pemerintah dari kota-kota tujuan para migran mampu menciptakan lapangan kerja dan fasilitas publik yang mencukupi. “Namun bila saja daya dukung kota sebagai suatu tempat publik sudah berada pada level yang kritis, maka pemerintah melalui berbagai macam kebijakannya perlu turun tangan guna mengurangi dampak buruk dari urbanisasi tersebut”. Urbanisasi berlebih perlu dikendalikan agar tidak berkembang makin liar dan semakin membebani

kota-kota tujuan kaum migran. “Arus urbanisasi berlebih tersebut tidak hanya dapat tereleminasi hanya dengan penerapan kebijakan pintu tertutup dan membatasi arus migrasi secara sepihak”. Kebijakan pintu tertutup hanya dapat berjalan efektif jika diimbangi dengan adanya upaya menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan desa-kota.

Satu Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah adanya proses modernisasi pertanian. Tanpa disadari adanya modernisasi di bidang pertanian malah akan mengurangi kesempatan kerja di sektor tersebut. Seiring dengan proses modernisasi, pola investasi di sektor pertanian pun turut berkembang, sekarang pola investasinya lebih bersifat menghemat tenaga kerja (*labour saving*), karena tenaga manusia pengolah lahan – lahan pertanian telah tergantikan oleh mesin-mesin yang serba otomatis. Karena hal tersebut urbanisasi menjadi satu-satunya jalan bagi para penduduk desa dalam menangani masalah tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kehidupan pembangunan dan keterbelakangan pandangan adalah satu rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterbelakangan di wilayah pedesaan muncul karena tidak terdapat keseimbangan pembangunan yang dilakukan di wilayah perkotaan. Penyumbang tersebar dalam kegagalan pembangunan di wilayah perdesaan adalah kesalahan pandang aktor-aktor berpengaruh dalam membuat pandangan terhadap kondisi pedesaan baik fisik maupun kondisi sosial masyarakatnya. urban bias merupakan konsep yang masih relevan samapai sekarang ini, dan masih mempengaruhi orientasi pembangunan di wilayah pedesaan.

Berkembangnya arus urbanisasi di Indonesia membuat kemiskinan hanya terfokuskan di kota, akan tetapi hal ini terjadi karena adanya persepsi masyarakat desa bahwa kota mewakili harapan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Terjadinya migrasi di perkotaan atau (urbanisasi) tidak akan menjadi masalah yang penting bagi pemerintah dari kota-kota tujuan para migran asalkan mampu menciptakan lapangan kerja dan fasilitas publik yang mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arialdi, R., & Muhammad, S. (2016). Pengaruh Urbanisasi, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Fertilitas Di Lima Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(1), 208-216.
- Arifin, S., & Firmansyah. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1-9.
- Fazaalloh, A. (2017). Urbanisasi, Industrialisasi, Pendapatan, Dan Pendidikan Di Indonesia. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 1(1), 16-23.
- Chambers, R. 1988. *Rural Development Putting The Last First*. Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. LP3ES: Yogyakarta. Penerjemah: M. Dawam Rahardjo
- Gilarso, T. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kamisius.

- Halfacree, K. H. 1993, 'Locality and social representation: space, discourse and alternative Definitions of the rural', *Journal of Rural Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 23-37.
- Hidayat, N. (2020). Fenomena Migrasi Dan Urban Bias di Indonesia. *JURNAL GEOGRAFI*, 12(01), 22-31.
- Ischak. (2001). Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. *Jurnal Humaniora*, 13(3), 275-283.
- Jalil, A. (2005). Kota: Dari Perspektif Urbanisasi. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, 9(15), 833-845.
- Mantra, B.I. (2007). *Demografi Umum*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nas, D. P. (2010). *Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24-44. Pasetyo, P. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Prasanti, D. (2018). Studi Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *JURNAL LONTAR*, 6(1), 13-21.
- Ramdhani, F. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35-45.
- Soetomo, S. (2009). *Urbanisasi dan Morfologi: Menuju Ruang Kehidupan Yang Manusiawi*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Stanef, M. R. 2012. Measuring Differences In Urban Rural Development: The Case Of Unemployment. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, Vol. 7, No. 3, pp. 44-52.
- Sukirno, S. (2008). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suntajaya, I. K. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Urbanisasi*

Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA*, 10(2), 61-70.

Syah, H. (2013). Urbanisasi dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Toleransi*, 5(1), 1-12.

Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pengembangan kota. *Jurnal Populasi*, 10(2), 57-72.

Todaru, M., & Stephan, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Waridin. (2002). Beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 3(2), 111-130.